

556

BEBERAPA MASALAH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MASYA- RAKAT PEDESAAN

SUKANTO*

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah kita ketahui, masyarakat (bangsa) Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari banyak suku dan golongan, serta mempunyai corak kebudayaan beraneka-ragam (sub-sub kultur). Di samping itu, penduduk Indonesia juga mempunyai sifat-sifat yang unik, antara lain penyebarannya tidak merata dan tingkat pertumbuhannya masih cukup tinggi.

Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 1980 menyebutkan, bahwa penduduk Indonesia berjumlah 147,5 juta jiwa, yang sebagian besar tinggal di lima pulau di antara 13.667 buah pulau di seluruh Indonesia, yaitu: 61,9% di Pulau Jawa dan Madura yang luas wilayahnya hanya 6,89% dari luas wilayah Indonesia, 19% di Sumatera, 7,1% di Sulawesi, 4,5% di Kalimantan dan 7,5% tinggal di pulau-pulau lainnya.¹ Hasil survei tenaga kerja nasional tahun 1976 juga menunjukkan, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, yaitu 8,4% (103,7 juta), dan 18,6% (23,7 juta) di daerah perkotaan.² Hingga kini hasil sensus penduduk tahun 1980 belum terperinci secara lengkap, namun diperkirakan bahwa perbandingan jumlah penduduk antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan pada tahun 1980 tidak banyak perubahannya.

Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan, bahwa sebagian besar penduduk di daerah pedesaan masih rendah tingkat pendidikan, ekonomi dan politiknya. Sebagian besar mereka belum dapat membaca dan menulis, serta

* Staf CSIS

1 BPS. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Penduduk 1980

tingkat pendapatannya juga masih rendah, sehingga kemampuannya untuk memiliki media modern juga masih rendah. Data BPS menunjukkan, bahwa perbandingan persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas media massa modern antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan pada tahun 1976, masih sangat timpang, yaitu: (a) di daerah pedesaan hanya 1,5% rumah tangga memiliki surat kabar, sedangkan di daerah perkotaan 18,1%; (b) di daerah pedesaan hanya 23,5% rumah tangga memiliki radio, sedangkan di daerah perkotaan 55,5%; (c) di daerah pedesaan hanya 0,3% rumah tangga memiliki pesawat televisi, sedangkan di daerah perkotaan 13,5%.¹ Tampaknya, perbandingan rumah tangga yang memiliki fasilitas media massa modern antara masyarakat pedesaan dan perkotaan hingga sekarang tidak banyak perubahannya. Hal itu berarti, bahwa sebagian besar media massa modern peredarannya masih terpusat di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya sangat sedikit dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa media massa modern belum tersebar secara merata sampai daerah-daerah pedesaan dan pedalaman.

Keadaan itu rupanya tidak jauh berbeda dengan keadaan di negara-negara berkembang lainnya. Ada yang menyatakan, bahwa di negara-negara berkembang terdapat dua sistem komunikasi, yaitu sistem komunikasi tradisional yang menggunakan saluran-saluran komunikasi interpersonal, dan sistem komunikasi yang menggunakan media massa modern.² Sistem komunikasi tradisional yang lebih banyak menggunakan saluran-saluran komunikasi interpersonal terdapat di daerah pedesaan, terutama karena sebagian besar masyarakatnya belum dapat membaca dan menulis, serta hanya sedikit yang memiliki media massa modern. Sedangkan sistem komunikasi yang menggunakan media massa modern terdapat di daerah perkotaan, yang sebagian besar penduduknya dapat membaca dan menulis, serta pendapatannya cukup tinggi sehingga dapat membeli beberapa jenis media massa modern.

Di samping itu, ada yang berpendapat, bahwa pengaruh media massa modern terhadap para petani di negara-negara berkembang akan lebih besar manfaatnya, jika media massa modern tersebut dipadukan dengan saluran-saluran komunikasi interpersonal. Dalam proses pembaruan masyarakat, media massa modern lebih penting artinya dalam fungsi pengetahuan, sedangkan saluran-saluran komunikasi interpersonal lebih penting artinya dalam fungsi persuasi.³ Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, di Indonesia juga terdapat dua sistem komunikasi seperti tersebut di atas.

1 BPS, *ibid.*, hal. 292-293

2 Wilbur Schramm, "The Flow of Information in the World", di dalam Drs. Dja'far H. Assegaff, *Bunga Rampai Komunikasi Pembangunan* (Jakarta: Media Consult, 1979)

3 Everett M. Rogers and F. Everett

Sekalipun perkembangan teknologi komunikasi modern juga telah terjadi di Indonesia, tampaknya sistem komunikasi tradisional, terutama saluran-saluran komunikasi interpersonal, mempunyai peranan yang sangat penting. Masih besarnya peranan saluran-saluran komunikasi interpersonal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (a) sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih rendah tingkat pendidikan, ekonomi dan politiknya, sehingga belum dapat membeli dan memanfaatkan media komunikasi modern, seperti surat kabar, radio dan televisi; (b) sifat sosial budaya "paternalisme" atau "bapakisme" masih kuat tertanam dalam masyarakat, sehingga pengaruh para pemimpin masyarakat, baik yang formal maupun nonformal, masih besar dalam masyarakat pedesaan; (c) pengaruh kebudayaan setempatpun masih ada, misalnya bahasa daerah masih berlaku, dan di beberapa daerah masyarakatnya bahkan lebih menguasai bahasa daerah daripada bahasa Indonesia; (d) masyarakat di daerah pedesaan pada umumnya lebih menyukai cara-cara penyampaian keterangan secara informal, misalnya melalui kesenian tradisional, obrolan dan anjungsana.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah, menunjukkan, bahwa para pemimpin masyarakat, tempat-tempat pertemuan, teman dan tetangga, serta kesenian tradisional, masih besar peranannya sebagai media komunikasi.¹ Melalui saluran-saluran komunikasi interpersonal itu, informasi (keterangan atau pesan) yang disampaikan melalui media massa modern lebih dijelaskan sehingga masyarakat benar-benar yakin akan pesan-pesan tersebut. Bahkan, saluran-saluran komunikasi interpersonal itu, terutama para pemimpin masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi saja, melainkan juga berfungsi sebagai komunikator (sumber informasi) dan pemuka pendapat, yang sering menjadi penasehat dan tempat bertanya mengenai berbagai masalah.

Selanjutnya, dalam tulisan ini akan dibahas saluran-saluran komunikasi interpersonal tersebut secara lebih terperinci, terutama untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan tantangan-tantangannya, sehingga dapat diketahui pula kemungkinan-kemungkinan penyempurnaannya.

1 Deppen, *Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan, 1976-1979*; lihat pula James C. Scott, "Patron-client Politics and Political Change in Southeast Asia", *American Political Science Review* (Mei 1973) dan Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, *Political*

PERANAN PARA PEMIMPIN MASYARAKAT PEDESAAN

Telah disinggung di depan, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Kemajemukan itu antara lain terlihat dari keanekaragaman corak kebudayaan masyarakat di daerah pedesaan, seperti terungkap dalam sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem ekonomi, teknologi, bahasa dan kesenian. Berdasarkan kriteria tersebut, terlihat adanya beberapa perbedaan corak kebudayaan antar masyarakat pedesaan, sekalipun di dalam satu suku, apalagi dengan masyarakat pedesaan di luar sukunya. Menurut kriteria tersebut, juga terlihat adanya beberapa perbedaan antara masyarakat pedesaan yang bertanam padi, masyarakat pedesaan nelayan, masyarakat pedesaan di daerah perkebunan, masyarakat pedesaan yang dekat dengan daerah perkotaan, dan masyarakat pedesaan yang berada di daerah pedalaman.

Akan tetapi di dalam keanekaragaman masyarakat pedesaan itu, tampak adanya gejala yang sama, antara lain bahwa setiap masyarakat ternyata memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan ataupun wewenang, yang biasanya disebut pemimpin. Dalam perkembangan sistem pemerintahan dan kebudayaan masyarakat setempat, di negara kita dikenal adanya pemimpin formal dan pemimpin nonformal. Pemimpin formal di daerah pedesaan adalah mereka yang menduduki jabatan atau posisi dalam hirarki administrasi pemerintahan, misalnya kepala desa dan pamong desa (perangkat desa) lainnya. Nama atau istilah kepala desa di Indonesia beraneka-ragam, misalnya di Jawa Tengah ia sering disebut lurah,¹ di beberapa desa di Tapanuli penghulu, di Minangkabau walinegeri atau penghulu, di Bali parek atau klian, di Gorontalo marsaoleh, dan di Ambon orang kaya.² Di lain pihak pemimpin nonformal adalah pemimpin tradisional yang mempunyai kedudukan secara turun-temurun, dan pemimpin agama, yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang tinggi ataupun mereka yang mempunyai kedudukan dalam lembaga-lembaga keagamaan.

Di samping itu, di dalam masyarakat pedesaan juga terdapat para pemuka lainnya. Mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu,

1 Dengan telah diundangkannya *Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, pengertian Kepala Desa dan Kepala Kelurahan diberi batasan tersendiri, yaitu Kepala Desa adalah kepala desa di daerah pedesaan, sedangkan Kepala Kelurahan adalah kepala kelurahan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari Kepala Kelurahan biasanya juga disebut Lurah.

2 Dra. Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).

misalnya orang-orang kaya yang mempunyai sifat kepemimpinan yang baik, serta orang-orang yang memiliki ketrampilan, keahlian dan pengalaman luas. Di desa-desa nelayan, dijumpai para pemilik perahu (kapal) ikan (juragan), yang menyewakan perahunya kepada para nelayan. Di desa-desa di Jawa Tengah, terutama pada masa pemilihan kepala desa, juga terdapat orang-orang yang menjadi pelindung dan pendukung utama calon-calon kepala desa (botoh). Di samping kaya, para botoh pada umumnya mempunyai peri laku yang baik, pengetahuannya luas dan terpancang di masyarakat pedesaan. Di daerah pedesaan, pada umumnya orang-orang yang memiliki radio, televisi dan surat kabar, juga menjadi pemuka pendapat dan sering menjadi tempat bertanya warga desa lainnya. Selain itu, orang-orang yang mempunyai keahlian dan ketrampilan, seperti petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), petugas KB dan pegawai pemerintah lainnya, juga sering menjadi tempat bertanya, terutama mengenai masalah-masalah di bidangnya.

Di dalam komunikasi massa, dikenal beberapa model arus komunikasi, yaitu model jarum injeksi (hypodermic needle model), model satu langkah (one-step flow model), model dua langkah (two-step flow model), dan model banyak tingkat (multi-step flow model). Di negara kita, tampaknya dipergunakan kombinasi dari model-model tersebut. Hal itu terlihat dalam informasi yang disampaikan secara langsung dari komunikator kepada para pendengar, gabungan informasi langsung dan melalui media massa modern, serta gabungan informasi langsung, lewat media massa modern dan saluran-saluran komunikasi interpersonal sekaligus.

Di antara saluran-saluran komunikasi interpersonal tersebut adalah para pemimpin formal dan nonformal, termasuk para pemuka masyarakat pedesaan lainnya. Para pemimpin masyarakat itu merupakan pemuka pendapat (opinion leader) dan sekaligus penyaring informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat pedesaan atau kelompoknya. Di samping itu, mereka juga menjadi penyalur umpan-balik dari masyarakat pedesaan. Menurut hasil-hasil penelitian, pengaruh mereka terhadap masyarakat pedesaan masih cukup kuat. Hal itu terutama disebabkan sifat sosial budaya masyarakat pedesaan yang paternalistis.

Hubungan para pemimpin dengan masyarakat pedesaan itu oleh James C. Scott dirumuskan dalam suatu konsep hubungan "patron-client", yakni ikatan dua pihak (dua orang) yang melibatkan persahabatan yang luas, di mana individu yang memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber-sumber dananya sendiri untuk memberikan perlindungan dan keuntungan kepada seseorang yang berkedudukan lebih rendah. Dengan demikian, hubungan ini adalah hubungan yang bersifat

tuan kepada patronnya.¹ Hubungan itu, rupanya juga menjadi salah satu sasaran penelitian Karl D. Jackson di beberapa desa di Jawa Barat. Hasil penelitiannya itu menunjukkan, bahwa peranan para pemimpin masyarakat, baik kepala desa maupun pemimpin agama, orang-orang kaya dan kaum wanita yang menjadi pemuka masyarakat pedesaan, masih mempunyai pengaruh dalam masyarakat pedesaan.²

Hasil penelitian Lembaga Studi Pedesaan dan kawasan Universitas Gajah Mada di beberapa desa di Propinsi Sumatera Barat dan Riau pada tahun 1977-1978 rupanya menunjukkan adanya suatu perkembangan pengaruh para pemimpin di dalam masyarakat pedesaan. Disimpulkan, bahwa kepala desa, para ulama dan pemimpin adat, mempunyai kemampuan untuk menyampaikan berbagai pesan pembangunan (polymorphic). Sebaliknya para pegawai dinas pemerintah hanya efektif sebagai penyampai pengetahuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya saja (monomorphic). Namun pengaruh para pegawai pemerintah mengenai masalah yang dibidangnya lebih besar dibandingkan dengan pengaruh para pemimpin masyarakat lainnya.³ Penelitian lainnya yang dilakukan oleh IKIP Bandung di beberapa desa di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada tahun 1979-1980, juga menarik kesimpulan yang serupa. Hal itu terlihat dari jawaban 98 responden, bahwa yang dipercaya menjadi pembimbing dalam mempelajari kaset Bimas pertanian adalah sebagai berikut: 34,69% PPL, 23,46% petani teladan, 22,45% pamong desa, 4,70% para juru penerangan, dan 3,06% ketua kelompok pendengar.⁴

James C. Scott pun berpendapat bahwa ada kecenderungan erosi ikatan dalam hubungan "patron-klien" di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kecenderungan itu terjadi antara lain akibat pengaruh kebijaksanaan pemerintah kolonial yang secara langsung mengatur masalah tanah, tumbuhnya komersialisasi dalam perupahan di sektor pertanian, semakin terbukanya pemasaran hasil-hasil pertanian, serta pengaruh gerakan kebebasan yang mempengaruhi para "klien" untuk melepaskan ketergantungannya dari "patron".⁵ Di Indonesia pembangunan yang dilancarkan selama ini rupanya juga ada pengaruhnya. Program-program pembangunan, seperti Bimas/Inmas pertanian, kredit peralatan bagi para nelayan, BUUD/KUD dan lain sebagainya, sekalipun belum mengubah keadaan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan secara dramatis, telah memperbaiki keadaan sosial-ekonomi banyak orang, sehingga tidak terlalu tergantung kepada orang lain.

1 James C. Scott, *op. cit.*; dan lihat pula: James C. Scott, "The Erosion of Patron-client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia", *Journal of Asian Studies* (Nopember 1972)

2 Karl D. Jackson, *op. cit.*, hal. 343

3 Deppen, *op. cit.*

4 Deppen, *Laporan Penelitian Apresiasi Masyarakat terhadap Medium Kaset, 1979-1980*

5 James C. Scott, *op. cit.*

Suatu hal yang dapat melonggarkan ikatan para pemimpin dan masyarakat pedesaan adalah sikap pribadi ataupun peri laku mereka. Pada jaman kerajaan di Jawa dikenal adanya aksi "pepe", yang menunjukkan rasa tidak puas terhadap kebijaksanaan raja. Tampaknya, dengan semakin berkembangnya pendidikan di daerah pedesaan, masyarakatnyapun mulai berpikir secara kritis, sehingga tidak hanya menerima pesan-pesan begitu saja. Dr. Mattulada berpendapat, bahwa kultur Indonesia mengenal perlunya satunya kata dengan perbuatan, sehingga seseorang, apapun kedudukannya dalam masyarakat, kalau tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya akan merugikan dirinya sendiri. Hal itu terungkap dalam peribahasa Minangkabau "raja alim raja disembah dan raja lalim raja disanggah". Dalam masyarakat Bugis adat istiadatnya bahkan lebih keras. Seorang raja yang tidak menepati kata-katanya harus diturunkan, dibunuh atau ditinggalkan.¹

Di samping itu, mentalitas meremehkan mutu, suka menerabas, tidak berdisiplin murni, suka mengabaikan tanggung jawab, terlampau banyak berorientasi ke atas, dan tidak percaya pada diri sendiri,² masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu terlihat antara lain dalam banyaknya pemberitaan di surat kabar tentang manipulasi tanah rakyat oleh kepala desa, pengaduan masyarakat pedesaan langsung ke DPR, dan pertentangan antara petani penggarap dan pemilikinya. Beberapa peristiwa itu memberikan kesan, bahwa para pemimpin masyarakat pedesaan itu kurang berorientasi kepada rakyat yang dipimpinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gejala-gejala semakin longgarnya ikatan pengaruh para pemimpin terhadap masyarakat pedesaan semakin jelas. Khususnya mengenai kepala desa, di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan, bahwa kepala desa harus menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Di samping itu, kepala desa juga merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penanganan urusan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Sekalipun tugas kepala desa demikian luasnya, sumber keuangan desa seperti diatur dalam undang-undang itu dapat dikatakan sangat terbatas. Demikian pula kegiatan-kegiatan desa dapat dikatakan merupakan sisa-sisa kegiatan yang tidak diurus oleh pemerintah di atasnya dan tidak banyak mendatangkan uang untuk membiayai urusan-urusan desa.

Keterbatasan tersebut juga mempengaruhi peranan kepala desa sebagai saluran komunikasi interpersonal. Sebab, dengan semakin luasnya pem-

1 Kompas, 2-7-1981

2 Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta, P.T. Gramedia,

bangunan dewasa ini, baik pembangunan prasarana maupun pendidikan, tampaknya masyarakat pedesaan sudah mulai terbuka, sehingga tidak cukup hanya diberi pesan-pesan pembangunan tanpa bukti-bukti yang nyata.¹ Di samping itu, banyak di antara kepala desa yang pendidikan dan pengetahuannya masih rendah, sehingga kurang menguasai secara mendetail masalah-masalah teknis pembangunan. Hasil penelitian IKIP Bandung di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa yang lebih dipercaya untuk menjadi pembimbing dalam mempelajari kaset pertanian adalah petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa masyarakat pedesaan sudah mengetahui saluran-saluran yang perlu ditempuh untuk mendapatkan keterangan yang bermanfaat baginya.

Demikianpun para ulama dan para pemimpin adat, tampaknya juga hanya menjadi sumber keterangan mengenai bidang-bidang yang dikuasainya saja. Hasil penelitian IKIP Bandung tersebut tidak menyebutkan berapa persen responden menyatakan para ulama sebagai pembimbing dalam mempelajari kaset pertanian. Dari angka-angka lain juga terlihat, bahwa tempat-tempat pengajian dan dakwah kurang berperan dalam masalah-masalah pembangunan yang bersifat teknis. Misalnya, mengenai cara penyajian kaset penerangan pertanian yang menjamin tanggapan spontanitas khalayak, peranan dakwah disebutkan hanya 0,75% dari jawaban 134 responden. Apabila hasil penelitian tersebut mengandung kebenaran, dapat dikatakan bahwa pengaruh pemimpin agama dan adat terhadap masyarakat pedesaan sudah mulai berkurang.

Dari uraian tersebut di atas tampak adanya kecenderungan ke arah spesialisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa spesialisasi merupakan tantangan dan sekaligus dapat menjadi masalah bagi para pemimpin masyarakat. Namun kecenderungan ke arah spesialisasi itu seharusnya tidak dijadikan kambing hitam. Dalam masa pembangunan ini, masyarakat pedesaan justru harus didorong untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Akan tetapi itu tidaklah berarti bahwa fungsi para pemimpin masyarakat tidak ada artinya lagi, melainkan bahwa mereka justru harus meningkatkan keahlian mereka di bidangnya masing-masing, dan meningkatkan kemampuan kepeimpinannya.

Terutama para kepala desa tampaknya mempunyai kesempatan yang besar untuk memperluas pengaruhnya daripada para pemimpin masyarakat pedesaan lainnya. Sebab, sebagai pemimpin formal, kepala desa mempunyai kekuasaan

1 Lihat: Wilbur Schramm, "How Communication Works", di dalam Drs. Onong U. Effendy,

serta wewenang, dan jaringan birokrasi pemerintahan yang luas. Hanya saja, dengan adanya perkembangan dalam masyarakat pedesaan, kiranya kekuasaan dan wewenang kepala desa tersebut akan lebih efektif bila didasari perilaku kepemimpinan yang baik dan ia lebih menguasai berbagai masalah pembangunan. Kewibawaan atau pengaruh kepala desa akan menjadi lebih besar jika ucapan atau pesan-pesan yang disampaikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, di samping kesatuan bahasa di dalam masyarakatnya, penting juga keterpaduan dengan aparat pemerintahan teknis lainnya. Dengan demikian setelah benar-benar diyakini oleh masyarakat desanya pesan-pesan yang disampaikan dapat segera dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam proyek-proyek. Atau, setidaknya masyarakat pedesaan dapat merasakan manfaat pesan-pesan yang disampaikan oleh kepala desanya.

PERANAN KESENIAN TRADISIONAL

Dalam keanekaragaman kebudayaan masyarakat pedesaan dijumpai pula keanekaragaman bentuk kesenian. Dalam perkembangannya, baik dalam masyarakat pra sejarah maupun dalam lingkungan yang sederhana, kesenian ternyata mendahului unsur-unsur kebudayaan lainnya, sebab melalui kesenian manusia mengekspresikan idenya. Atau, lebih tepat dikatakan, dengan keseniannya manusia mengekspresikan pengalaman keindahannya. Kiranya jelas, bahwa manusia selalu menyatu (luluh) dengan yang indah. Dalam perkembangan lebih lanjut, seiring pula dengan perkembangan masyarakat, muncul seni lukis, seni pahat, seni rupa, seni sastra dan sebagainya, bahkan bermunculan kesenian-kesenian khusus.¹ Kesenian-kesenian khusus itu sangat erat berkaitan dengan pandangan masyarakat (masyarakat setempat) dan pandangan agama tertentu.

Perkembangan kesenian tersebut rupanya juga menghadapi banyak masalah. Antara lain adanya seni-seni tradisional yang punah, menuju kepunahan dan ada pula yang masih tetap hidup tetapi hanya dikembangkan untuk suatu kelompok yang sangat terbatas, padahal kesenian tradisional merupakan salah satu unsur utama kebudayaan nasional yang khas Indonesia.² Oleh karena itu, kesenian tradisional perlu dipelihara kontinuitasnya. Kelangsungan hidup kesenian tradisional sangat penting sebagai dasar identitas kebudayaan nasional. Hal itu berarti bahwa perlu dikembangkan kemungkinan untuk memperkaya sumber-sumber kreativitas dan wilayah penghargaan (apresiasi) terhadap kesenian tradisional menuju masa

1 Driyarkara, *Tentang Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980)

depan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha, antara lain kegiatan yang mendorong hidup kembali dan berkembangnya kesenian tradisional, serta kegiatan pengawetan dengan memelihara sumber perkembangan seni tersebut, terutama yang menampakkan kekhasannya.

Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional tersebut kiranya tidak hanya bermanfaat ditinjau dari segi keseniannya saja, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi interpersonal. Kesenian tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi interpersonal adalah yang mengandung percakapan. Namun ini tidak berarti bahwa bentuk-bentuk kesenian tradisional lainnya tidak berperan sama sekali. Kesenian tradisional itu dapat dimanfaatkan sebagai daya penarik masyarakat pedesaan dalam pertemuan-pertemuan.

Hasil penelitian Lembaga Studi Pedesaan dan kawasan Universitas Gajah Mada di Propinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat (1976-1977), Sumatera Barat dan Riau (1977-1978), menunjukkan adanya seni-seni tradisional yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi interpersonal. Misalnya, dul muluk, pantun bersahut, guritan, yelihiman, andai-andai dan mujahan di Sumatera Selatan; randai, salawak talam, rabab dan salung di Sumatera Barat; randai dan kayat di Riau; topeng, longser, reog, sandiwara, wayang golek dan calung di Jawa Barat.¹ Apabila diteliti lebih lanjut, di propinsi-propinsi lainnyapun dapat ditemukan banyak kesenian tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi interpersonal, misalnya wayang kulit, wayang orang, wayang suluh, sandiwara, dagelan dan ketoprak di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali; topeng dan gambang keromong di DKI Jakarta; ludrug dan reog di Jawa Timur, dan sebagainya.

Penelitian tersebut juga menunjukkan, bahwa tingkat popularitas seni-seni tradisional itu, sekalipun di dalam satu propinsi, tidak sama. Namun seni-seni tradisional yang mengandung dialog mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat setempat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh IKIP Bandung² juga menunjukkan hal yang serupa. Disebutkan bahwa mengenai cara penyajian kaset pertanian yang menjamin tanggapan spontanitas khalayak, jawaban dari 134 responden adalah sebagai berikut: 38,06% melalui obrolan, 22,39% dengan sandiwara, 15,68% dengan nyanyian, 11,19% dengan lawakan, 5,22% dengan wayang, dan 0,75% dengan dakwah.

Sekalipun mempunyai peranan sebagai penunjang fungsi komunikasi, seperti saluran komunikasi interpersonal lainnya, kesenian tradisional

1 Deppen, *op. cit.*

rupanya hanya efektif sebagai pembangkit kesadaran masyarakat pedesaan. Di samping itu, seni-seni tradisional juga mengandung kelemahan, antara lain karena bahasa yang dipergunakan biasanya bahasa daerah, waktu pementasannya panjang dan biaya untuk pementasannya juga relatif mahal. Penggunaan bahasa daerah memang dapat lebih efektif untuk meyakinkan masyarakat setempat. Namun, penonjolan kesenian khusus dan pemakaian bahasa daerah secara berlebihan tidak mustahil akan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghambat pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di samping menggunakan bahasa daerah, banyak kesenian tradisional biayanya besar dan waktu pertunjukannya panjang, ceritanya berorientasi pada kehidupan feodal dan otoriter, dan bahkan sifatnya sadis dan erotik. Di banyak tempat sering dijumpai pesta perkawinan, pesta panen dan lain sebagainya yang dimeriahkan dengan pementasan kesenian tradisional sampai berhari-hari. Pesta semacam itu kiranya merupakan pemborosan harta dan waktu, serta kurang sesuai dengan tuntutan pembangunan, seperti manajemen yang baik dan kerja keras.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, kiranya perlu dicarikan alternatif yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, antara lain dengan mengganti bahasa daerah dengan bahasa Indonesia, memperpendek waktu pertunjukan dan menciptakan bentuk-bentuk baru tanpa merusak sendi-sendi keseniannya. Dalam rangka itu usaha-usaha seperti pengindonesiaan wayang dan seni-seni tradisional lainnya, serta penggunaan teknologi baru (misalnya melalui kaset dan kaset video), kiranya perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Penciptaan bentuk-bentuk baru, misalnya cerita dan skenario baru yang berlandaskan sendi-sendi kesenian tradisional, kiranya masih tetap menampakkan kesenian nasional yang khas. Di lain pihak pemakaian teknologi baru tersebut kiranya akan dapat menekan biaya pementasan, sehingga dapat dinikmati rakyat banyak, dan memperluas wilayah apresiasinya. Dengan demikian kesenian tradisional akan dapat bersaing dan berdampingan dengan kesenian modern.

PERANAN TEMPAT-TEMPAT PERTEMUAN

Di daerah pedesaan, selain saluran-saluran komunikasi interpersonal seperti disebutkan di atas, juga masih dijumpai saluran lain, yaitu tempat-tempat pertemuan seperti kantor desa, balai desa atau balai rakyat, mesjid, langgar, surau, gereja, pura, rumah adat, pasar, warung dan rumah tempat tinggal para pemimpin masyarakat. Di beberapa desa di Jawa Tengah dikenal adanya pertemuan yang diselenggarakan setiap 35 hari (selapanan) di balai desa atau di

pemimpin formal dan masyarakat pedesaan, serta untuk musyawarah desa guna membicarakan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat pedesaan. Tempat-tempat beribadah, di samping untuk ibadat, juga sering dipergunakan sebagai tempat pertemuan untuk membicarakan berbagai masalah di luar masalah keagamaan. Di samping itu, dalam waktu-waktu tertentu dan waktu luang, sering terjadi pertemuan-pertemuan antar warga masyarakat di warung-warung (warung kopi), pasar, pesta panen dan kenduri.

Rupanya peranan tempat-tempat pertemuan itupun berbeda-beda antara masyarakat pedesaan yang satu dan yang lain. Hasil penelitian IKIP Bandung¹ menunjukkan bahwa jawaban dari 153 responden di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan mengenai tempat dan waktu kaset pertanian dibicarakan orang adalah sebagai berikut: 21,57% pada waktu luang di warung-warung, 17,65% di surau, 16,34% pada waktu Jum'at-an, 14,38% di tempat pengajian, 11,11% di tempat perayaan, 5,88% pada rapat kelompok pendengar, dan 4,57% pada waktu pesta panen.

Menurut penelitian Wihara Gumelar di beberapa desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 1973² balai desa merupakan tempat pertemuan yang penting, sedangkan warung-warung kopi kurang berperanan, terutama karena masyarakat pedesaan umumnya tidak mempunyai uang. Di desa-desa nelayan, langgar rupanya kurang dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan daripada di desa-desa yang bertanam padi. Sekalipun demikian, tempat-tempat pertemuan tersebut mempunyai peranan sebagai jaringan komunikasi interpersonal, terutama untuk menjelaskan kekurangan media massa modern. Di samping itu, komunikasi interpersonal yang dilakukan secara informal, misalnya melalui anjungsana atau kunjungan ke rumah-rumah penduduk secara tidak resmi, rupanya lebih efektif untuk mendapatkan umpan balik.

Peranan komunikasi secara informal semacam itu rupanya sudah dikenal dan dimanfaatkan pada jaman pemerintahan kolonial. Dr. Ida Bagus Mantra,³ dari Universitas Gajah Mada, mengatakan, bahwa pada jaman penjajahan Belanda dipergunakan tiga macam pola pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera. Pola pertama dilakukan dengan membiayai secara penuh pengangkutan mereka yang ingin pindah ke Sumatera, tetapi kebijaksanaan ini gagal. Pola kedua dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang ingin pindah ke Sumatera, tetapi kebijaksanaan ini juga menemui kegagalan. Sekalipun pola-pola tersebut gagal, terjadi juga perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera (Lampung). Perpindahan itu rupanya ter-

1 *Ibid.*

2 Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, *op. cit.*, hal. 256-258

3 *Ibid.*

jadi karena rekan sedesa pulang dari Lampung dengan cerita mengenai kemungkinan hidup yang lebih baik di daerah transmigrasi. Oleh karena itu, pola ketiga dilakukan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang sudah berhasil di daerah transmigrasi yang bersedia pulang ke desa asal mereka untuk mengajak para tetangganya.

Semuanya itu menunjukkan, bahwa faktor teman dan tetangga cukup mempunyai pengaruh. Teknik-teknik informal tersebut rupanya masih efektif bagi masyarakat Indonesia. Misalnya banyak warga desa menerima pesan-pesan melalui obrolan, dagelan, lawakan ataupun obrolan ki dalang yang mereka senangi. Bahkan teknik informal itu juga sering dipakai oleh para negarawan, politisi ataupun diplomat, misalnya melalui sarasehan, berbuka puasa bersama dan lobbying dalam proses penyelesaian rancangan undang-undang dan sebagainya.

Kiranya dapat pula dikatakan, bahwa teknik-teknik informal tersebut dapat digunakan untuk pertemuan-pertemuan di tempat-tempat yang lebih resmi, misalnya di balai desa atau tempat-tempat ibadah. Pola pertemuan yang bersifat monolog, di mana hadirin hanya sekedar pendengar dan pertemuan-pertemuan sekedar berkumpulnya khalayak, kiranya suasananya dapat lebih dihidupkan dengan teknik-teknik informal tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dikatakan, bahwa dalam masyarakat pedesaan, para pemimpin formal dan nonformal, kesenian tradisional, dan tempat-tempat pertemuan, mempunyai peranan penting, terutama sebagai saluran komunikasi interpersonal. Saluran-saluran tersebut dapat dikatakan pula sebagai bagian dari kehidupan tradisional, dan masih menunjukkan keserasiannya dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Dalam masa pembangunan atau dalam jaman modern ini, masih dijumpai suatu pandangan, seolah-olah kehidupan yang tradisional akan menghambat pembangunan ataupun modernisasi. Dalam beberapa hal kehidupan tradisional itu memang dapat menghambat, namun banyak unsurnya dapat menunjang pembangunan ataupun modernisasi. Hidup modern dan tradisi seharusnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya akan selalu dijumpai dalam kehidupan, karena kehidupan yang baik ialah kehidupan yang dituntut oleh tradisi yang berkembang dari potensi yang mendukungnya, sesuai dengan langgam kehidupan kekinian. Dengan demikian, pembangunan ataupun

jangkauan pengendalian yang tumbuh dan berkembang dari dalam potensi itu sendiri.¹ Dalam GBHN 1978 hal itu juga telah ditegaskan dan dituangkan dalam asas-asas pembangunan nasional, antara lain dalam asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas peri kehidupan dalam keseimbangan.

Seirama dengan perkembangan selama ini, terlihat pula adanya perkembangan peranan saluran-saluran komunikasi tersebut. Pengaruh atau ikatan antara para pemimpin dan masyarakat pedesaan, yang semula sangat erat, kini mulai mengendor. Kecenderungan mengendornya ikatan itu antara lain adalah akibat pengaruh pembangunan yang dilancarkan selama ini, sehingga masyarakat pedesaan mulai sadar akan hak dan kewajibannya. Di samping itu, sektor-sektor pembangunan juga mulai bergerak secara fungsional dan tampak adanya kecenderungan ke arah spesialisasi. Dengan adanya perkembangan tersebut, rupanya masyarakat pedesaanpun mulai mengetahui jalur-jalur yang harus ditempuh sesuai dengan kebutuhannya.

Di antara para pemimpin masyarakat pedesaan tersebut, yang mempunyai kesempatan luas untuk memperluas pengaruhnya adalah kepala desa. Alasannya ialah karena kepala desa merupakan pemimpin formal dan dipilih secara langsung oleh warga masyarakat desanya, sehingga kekuasaan dan wewenang yang ada padanya dapat dikatakan nyata dan sah. Kekuasaan dan wewenang kepala desa itu kiranya akan lebih efektif serta mempunyai ikatan pengaruh yang lebih luas, jika ia mampu mengembangkan kepemimpinan yang baik, dalam arti lebih berorientasi kepada masyarakat pedesaan yang dipimpinnya, bukannya untuk kepentingan pribadi, serta bukan untuk melestarikan nilai-nilai yang terlampau banyak berorientasi ke atas. Nilai-nilai yang terlampau banyak berorientasi ke atas justru dapat mematikan kemauan untuk berusaha atas kemampuan sendiri serta tanggung jawab, dan dapat menumbuhkan sikap "ABS" tanpa adanya disiplin murni masyarakat yang dipimpin ataupun dirinya sendiri.

Di samping itu banyak kepala desa maupun pemimpin agama memiliki tanah yang luas. Sebagai akibatnya mereka dapat mengikat pengaruh terhadap para petani penggarap tanahnya. Namun, hubungan tersebut juga dapat terjebak dalam tindakan pemerasan atau terjerumus dalam kehidupan feodalistis. Oleh karena itu, sebagai pemimpin masyarakat dan "bapak panutan", mereka seharusnya bersedia memelopori terlaksananya Undang-undang tentang Bagi Hasil (UUBH). Dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan dan kepemimpinan yang lebih banyak berorientasi kepada masyarakat pedesaan yang dipimpinnya, mereka kiranya akan memperbesar

1 Lihat: Mattulada, "Pengaruh Tradisi dan Modernisasi dalam Pembangunan Masyarakat

kewibawaan dan pengaruhnya. Dengan demikian, pesan-pesan yang disampaikan akan selalu diperhatikan oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Bentuk kehidupan tradisional lain yang dapat dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi interpersonal adalah kesenian tradisional, terutama yang mengandung percakapan. Kiranya tidak ada yang menyangkal, bahwa kesenian (tradisional) merupakan salah satu unsur utama kebudayaan nasional yang khas. Namun, banyak kesenian tradisional terlampaui banyak menampakkan diri sebagai kesenian khusus, menggunakan bahasa daerah, panjang waktu pementasannya dan besar biaya pertunjukannya sehingga hanya dapat dijangkau oleh orang-orang kaya. Hal-hal itu, di samping dapat menghambat pengembangan keseniannya sendiri, juga dapat mengurangi efektivitasnya sebagai saluran komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, pengawetan, pemeliharaan dan pengembangannya perlu diusahakan tanpa merusak sendi-sendi keseniannya maupun persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya perlu dihindari pertunjukan yang dapat membangkitkan kembali sentimen-sentimen primordial (SARA) dan menghamburkan harta dan waktu. Dalam rangka itu, usaha-usaha pengindonesiaan seni-seni tradisional, penciptaan bentuk-bentuk baru dan penyesuaian dengan teknologi modern kiranya perlu lebih ditingkatkan dan disempurnakan.

Suatu hal lain yang kiranya juga perlu mendapatkan perhatian adalah sifat pertemuan dalam masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat pedesaan tampaknya lebih menyenangi penyampaian pesan melalui cara-cara informal, misalnya obrolan, anjaksanaan, dan percakapan antar teman. Apabila hasil penelitian tersebut mengandung suatu kebenaran, maka cara-cara penyampaian pesan dengan main instruksi, sok kuasa, apalagi dengan ancaman dan kekerasan, kurang efektif dan tidak akan mencapai sasaran yang dikehendaki. Cara-cara tersebut mungkin dapat mengumpulkan banyak orang dalam suatu pertemuan, namun menimbulkan perasaan waswas, takut dan apatis. Oleh karena itu, pertemuan dalam masyarakat pedesaan seharusnya dilakukan dengan cara-cara informal dan tidak boleh bersifat monolog, agar hadirin tidak hanya menjadi pendengar yang baik, melainkan juga aktif. Melalui cara-cara tersebut, kiranya akan diperoleh umpan balik yang lebih baik dari masyarakat pedesaan.

Sebagai catatan terakhir dari tulisan ini, perlu diperhatikan pentingnya kesatuan bahasa, sebab tanpa adanya kesamaan pengertian komunikasi dapat dikatakan menemui kegagalan. Kepala desa selaku pemimpin formal seharusnya mampu menjadi dirijen di lingkungannya dan pemain musik dalam tataran nasional. Artinya, kepala desa seharusnya mampu mengkoordinasikan seluruh potensi di dalam desanya dan aktif di luarnya, agar terwujud kesatuan bahasa dan kesatuan tindakan. Dalam rangka itu Pusat-pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) seharusnya lebih meningkatkan peranannya, agar kesatuan bahasa dapat terwujud dalam lingkungan yang